

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA
(GCG)PT. BPR SINAR KUTA
MULIA TAHUN 2023



Jalan Raya Kuta No.61 X Kuta

TELEPON: 0361 754078

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Sinar Kuta Mulia pada tahun 2022 telah membawa perkembangan yang positif di sepanjang tahun 2023 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

PT. BPR Sinar Kuta Mulia memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Sinar Kuta Mulia dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Provinsi Bali. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Sinar Kuta Mulia didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organbank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Sinar Kuta Mulia.

BPR Sinar Kuta Mulia telah beroperasi lebih dari 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi BPR yang sehat, kuat dan terpercaya.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Sinar Kuta Mulia selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan

Di sepanjang 2023 dan untuk di tahun mendatang, BPR Sinar Kuta Mulia terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	I Gede Sukrawan
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain. b. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. c. Mengkinikan ketentuan atau SOP yang belum diatur dalam pedoman internal bank. d. Memantau penurunan NPL, efisiensi biaya yang bisa dilakukan dengan cara menempatkan idle fund yang optimal serta memastikan BPR beroperasi secara sehat dan menguntungkan bagi Pemegang Saham, manajemen, karyawan dan masyarakat luas. e. Melakukan pengawasan terhadap resiko Teknologi Informasi dan pelaksanaannya agar aman, dapat dipercaya, berkelanjutan dan stabil. 			
2.	Nama	:	Ni Putu Ari Supradnyani
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur merangkap Kepatuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan Operasional Bank, terutama yang berkaitan dengan bidang pengelolaan data keuangan dan perencanaan serta pengembangan usaha Bank. b. Menciptakan suasana kerja yang harmonis baik diantara kepala bagian atau bawahannya. c. Mengevaluasi, mengembangkan kemampuan dan secara berkala menilai prestasi kerja karyawan/karyawati. d. Menghadiri semua rapat direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya. e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan baik yang dilakukan oleh Direksi maupun pegawai BPR. 			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.b. Direksi selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. |
|--|

<p>c. Direksi telah mengupayakan agar Cash Ratio tetap berada pada kisaran yang memadai</p> <p>d. Monitor secara ketat debitur yang terdampak COVID-19 sudah dilaksanakan dan setiap bulan dilakukan rapat koordinasi dengan para team leader.</p> <p>e. sebagian besar temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti pada desember 2023.</p> <p>f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing- masing.</p> <p>g. Pelatihan in house training untuk karyawan telah dilaksanakan melalui zoom meeting dan tatap muka</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Putu Gde Suartha
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris</p> <p>a. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku dan pedoman terbaru tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris tanggal 6 Agustus 2021</p> <p>b. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>e. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>f. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>g. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen, dan tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>h. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.</p>		
2.	Nama	:	I Made Mandia
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	ugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		

- a. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku dan pedoman terbaru teruang dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris tanggal 6 Agustus 2021
- b. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- e. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- g. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen, dan tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- h. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Rekomendasi Kepada Direksi :

- a. Kedepannya hendaknya appraisal agunan tidak hanya berfokus kepada nilai agunan sesaat, tetapi juga terhadap kemungkinan terjadinya risiko penurunan nilai sebagai akibat dari beberapa hal seperti terkena banjir/ longsor, letak agunan yang berubah menjadi terpencil, jalan masuk ke lokasi disengketakan, dll.
- b. Direksi agar tetap mengupayakan tingkat kesehatan Bank dalam posisi sehat.
- c. Kedisiplinan karyawan terhadap jam kerja perlu dievaluasi. Direksi perlu membuat aturan yang mengatur tentang izin keterlambatan kerja karena alasan mengunjungi/ menemui nasabah
- d. Melakukan Appraisal penurunan nilai untuk AYDA yang agunannya sudah tidak marketable
- e. Memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawan peraturan baru yaitu PMK No.41 tahun 2023 terkait PPN atas penjualan AYDA yang sudah mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023.
- f. Melaksanakan pelatihan APU PPT paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.
- g. Direksi agar melakukan penjajagan yang lebih mendalam dengan vendor IT (gobali-IT) dan diharapkan agar implementasi pergantian core banking dapat terlaksana pada tahun 2024.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit

	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Nihil

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Gede Sukrawan	Rp0	0%
2.	Ni Putu Ari Supradnyani	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Kepemilikan saham Anggota Direksi pada PT. BPR Sinar Kuta Mulia tidak ada			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Gede Sukrawan	-	-	0%
2.	Ni Putu Ari Supradnyani	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR Lain dan perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Gede Sukrawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ni Putu Ari Supradnyani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keuangan Anggota Direksi pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga
-----	--------------	-------------------

		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Gede Sukrawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ni Putu Ari Supradnyani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga antara Anggota direksi dengan Direksi lain, Komisaris dan Pemegang Saham				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Putu Gde Suartha	Rp0	0%
2.	I Made Mandia	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PT. BPR Sinar Kuta Mulia			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Putu Gde Suartha	-	-	0%
2.	I Made Mandia	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Putu Gde Suartha	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Mandia	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Putu Gde Suartha	Tidak ada	Tidak ada	Kompiang Sri Martini - istri
2.	I Made Mandia	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris utama Putu Gde Suartha memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham Kompiang Sri Martini (istri)				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)
1.	Gaji	2	Rp338.726.000	2	Rp300.300.000
2.	Tunjangan	2	Rp24.831.965	2	Rp23.958.320
3.	Tantiem	2	Rp116.256.676	2	Rp99.200.000
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp479.814.641		Rp423.458.320
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan hasil RUPS					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (1)	Kendaraan Dinas (1)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (2)	BPJS (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan hasil RUPS			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.23 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.16 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.11 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.05 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
nihil	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	03 Maret 2023	2	Pelaksanaan rencana bisnis tahun 2022
2.	12 Juli 2023	2	Kinerja bulan Juni 2023 dan Tindak lanjut temuan OJK
3.	14 Agustus 2023	2	Tindak lanjut pelaksanaan lelang online dan sosialisasi PMK No.41 Tahun 2023
4.	23 November 2023	2	Pelaksanaan Rencana Bisnis bulan posisi Oktober

		2023 dan penerapan program APU PPT
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :		
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 4 (lima) kali dalam setahun pada tahun 2023		

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Putu Gde Suartha	4	0	100%
2.	I Made Mandia	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota dewan komisaris selalu hadir setiap rapat dewan komisaris diadakan				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan pegawai tidak tetap pada PT. BPR Sinar Kuta Mulia								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
Total	0	1
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nasabah atas nama Luh Putu Merta Sari mengajukan laporan pengaduan masyarakat ke Reskrimsus Polda Bali terkait dengan asuransi kreditnya di PT. BPR Sinar Kuta Mulia. Saat ini laporan tersebut masih di tangani Reskrimsus Polda Bali dan belum dapat dipastikan waktu penyelesaiannya.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Selama tahun 2023 PT. BPR Sinar Kuta Mulia tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Sinar Kuta Mulia
Alamat	: Jalan Raya Kuta No.61 X Kuta
Nomor Telepon	: 0361 754078
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp15.678.900.655
Total Aset	: Rp44.944.548.358

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Sinar Kuta Mulia Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.39	0.278
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.51	0.227
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.13	0.213
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.10	0.210
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.80	0.045
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.84	0.184
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.90	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	1.90	0.143
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.95	0.146
Nilai Komposit			1.800
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.39)

Persyaratan- persyaratan dari regulator (OJK) berkaitan dengan keanggotaan Direksi telah dipenuhi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, dan telah berjalan efektif, serta seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.51)

Persyaratan- persyaratan dari regulator (OJK) berkaitan dengan keanggotaan Dewan Komisaris telah dipenuhi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip- prinsip GCG, dan telah berjalan efektif, serta seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak menerapkan Fungsi Komite karena modal inti BPR < 50 M.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan yang lengkap, sebagaimana tercantum untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi diatur di dalam pedoman tata tertib kerja dan untuk karyawan diatur dalam kode etik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.13)

Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.1)

PE Audit Intern di BPR Sinar Kuta Mulia telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.8)

PT. BPR Sinar Kuta Mulia telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.84)

PT. BPR Sinar Kuta Mulia telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan manajemen risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk

perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

PT. BPR Sinar Kuta Mulia telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. PT. BPR Sinar Kuta Mulia dalam menjalankan operasional selalu menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak melakukan pelanggaran maupun pelampauan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.9)

Rencana Bisnis Bank PT. BPR Sinar Kuta Mulia telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.95)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT. BPR Sinar Kuta Mulia telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan Non keuangan. PT. BPR Sinar Kuta Mulia telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa :

1. Aspek Struktur Tata Kelola

Faktor Positif PT. BPR Sinar Kuta Mulia senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT. BPR Sinar Kuta Mulia masih membutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang masih dirangkap oleh 1 pegawai.

2. Aspek Proses Tata Kelola

Faktor positif yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. PT. BPR Sinar Kuta Mulia senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Faktor negatif aspek Proses Tata Kelola adalah PT. BPR Sinar Kuta Mulia perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi saat ini.

3. Aspek Hasil Tata Kelola

Faktor positif yaitu Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang cukup baik. Dilihat dari kecukupan modal, PT. BPR Sinar Kuta Mulia saat ini memiliki rasio KPMM sebesar 105,71%. Sedangkan dari sisi negatif, Aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2023 masih terdapat pengenaan sanksi dari regulator.

Badung, 18 Januari 2024

PT. BPR Sinar Kuta Mulia





Putu Gde Suartha
Komisaris Utama

I Gede Sukrawan
Direktur Utama